



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**RANCANGAN**  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR .... TAHUN 2017

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor .... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor ...);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.045.575.791.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	149.228.860.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	719.271.894.600,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	107.075.037.000,00

Jumlah Pendapatan		Rp. 975.575.791.600,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 332.640.309.081,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 3.000.000.000,00	
4) Belanja Hibah	Rp. 10.000.000.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.000.000.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 5.931.100.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.500.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp. 354.071.409.081,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 73.973.474.195,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 313.145.042.782,00	
3) Belanja Modal	Rp. 304.385.865.542,00	
Jumlah Belanja Langsung		Rp. 691.504.382.519,00
Jumlah Belanja Daerah		Rp. 1.045.575.791.600,00
Surplus/(Defisit)		Rp. (70.000.000.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp. 70.000.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto		Rp. 70.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

## **Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

**Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Bontang.

**Pasal 5**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal .....  
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal .....  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ARTAHNAN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR ....